



SCAN ME

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS**  
**803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

# MENGEMUKA, USULAN SEMUA CAPRES-CAWAPRES DIPERIKSA KPK



Meski masih kurang 156 hari lagi dari hari H pencoblosan (dijadwalkan 14 Februari 2024, Red), tapi adu argumen dan usulan soal Pemilihan Presiden (Pilpres) makin memanas. Terbaru, dorongan agar semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemuka kembali. Ini merupakan buntut dari pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker). Pemeriksaan kepada Cak Imin itu dinilai kental dengan kepentingan politik karena terjadi saat dia diumumkan secara resmi menjadi bakal cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan. Beberapa partai politik mendukung, tapi sebagian yang lain keberatan. Bagi pihak pro hal itu dinilai sebagai upaya antisipasi pemberantasan korupsi. Namun, pihak kontra mengatakan tidak ada urgensinya. Sebab KPK bukan lembaga cap stempel clean and clear. Tetapi lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Di sisi lain, rencana mempercepat dan memperpendek pendaftaran bacapres-bacawapres juga makin matang.

(Baca Hal 11)

## HARTA PARA CALON YANG BERLAGA DI PILPRES 2024



**PRABOWO SUBIANTO**  
**RP 2,03 T**

10 Bidang Tanah dan Bangunan  
**RP 273 M**

8 Unit Kendaraan  
**RP 1,25 M**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 16,3 M**

Kas Setara Kas  
**RP 2,5 M**

Surat Berharga  
**RP 1,7 T**



**GANJAR PRANOWO**  
**RP 11,77 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 2,62 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 1,62 M**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 705,86 JT**

Kas Setara Kas  
**RP 6,82 M**



**ANIES BASWEDAN**  
**RP 10,96 M**

6 Bidang Tanah dan Bangunan  
**RP 14,72 M**

3 Unit Kendaraan  
**RP 550 JT**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 1,37 M**

Kas Setara Kas  
**RP 1,21 M**

Surat Berharga  
**RP 61,1 JT**



**MUHAIMIN ISKANDAR\***  
**RP. 27.280,5M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 24.7 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 259 JT**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 171,5 JT**

Kas Setara Kas  
**RP 2.15 M**

KETERANGAN:  
\* per 31 Desember 2022

**Government (Hal.2)**  
**Buntut Singgung**  
**Capres Usia Muda,**  
**DPR Menilai**  
**Ketua MK Tak Etis**

# Rusuh Pulau Rempang Kepri

## Ombudsman: Hentikan Sementara Relokasi!

**JAKARTA** - Seribuan masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau (Kepri) melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam, Kota Batam, pada Senin (11/9/2023). Massa dipaksa mundur oleh Polresta Barelang, Senin sore, hingga akhirnya membubarkan diri setelah ditembakkan gas air mata

Masyarakat melayu ini tetap bertahan di kawasan Alun-alun Engku Putri setelah menerobos masuk kantor BP Batam pada siang hari. Massa kemudian mundur dari depan kantor BP Batam. Ricuh di depan kantor BP Batam setidaknya merusak kaca-kaca kantor BP Batam dan pagar.

Ombudsman pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara upaya relokasi warga di Pulau Rempang seiring dengan terjadinya bentrokan. Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh terulang lagi, karena akan mengganggu kondusifitas di Batam.

"Peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali, pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan kembali solusi lain untuk merelokasi warga, karena masyarakat telah menolak opsi yang telah ditawarkan. Oleh karena itu Ombudsman berharap dihentikan dulu upaya relokasi untuk menjaga suasana kondusif disana," kata Lagat, Senin (11/9/2023) di Batam Centre.

Lagat berharap ketika BP Batam mengembangkan proyek investasi yang bernilai besar ini, tidak hanya mampu memberikan dampak ekonomis kepada warga, tapi juga mampu bersikap bijak dalam merelokasi, dengan mempertimbangkan untuk mempertahankan kehidupan sosial dan budaya warga di pulau tersebut.

Dia melihat warga tidak menolak rencana investasi, tapi kampung mereka jangan sampai digusur. "Pemerintah harus bijak dalam merelokasi sekitar 10.000 warga Rempang, yang berdiam di atas 16 kampung tua yang telah dihuni turun temurun sejak 1834," tuturnya.

Lagat meminta agar BP Batam memaksimalkan upaya dialog ataupun musyawarah, dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal. "Kami juga berharap agar masyarakat tetap merespon upaya dialog dengan pemerintah untuk membicarakan resolusi dan tidak melakukan pergerakan yang anarkis dengan tetap menjaga kondusifitas," ungkapnya.

Informasi relokasi ini baru tersiar setelah dibentuknya tim percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan (green investment) di kawasan Rempang kota Batam, Provinsi Kepri melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKKPM



Pengunjuk rasa melempari personel polisi saat aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). (antara)

Nomor 174 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023. "Namanya investasi ramah lingkungan, maka sepatutnya juga cara pemerintah akan merelokasi Warga Rempang juga harus ramah. Pulau Rempang dan Galang selama ini berstatus quo, dan juga belum pernah diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya," paparnya.

### Sandiaga Ingatkan Dampak ke Investasi

Terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara soal kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Diberitakan sebelumnya, bentrok antara warga dengan aparat gabungan TNI-Polri terjadi di Pulau Rempang. Hal ini seiring penolakan warga yang terancam digusur untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.

"Saya berharap ini bisa ditangani dengan lebih baik karena investasi butuh suasana kondusif. Kalau tidak kondusif, investasi kemungkinan tidak akan mulus," ujar Sandiaga ketika ditemui di Kantor Kemenparekraf.

Proyek Rempang Eco City bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kawasan tersebut dijadikan proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Namun belakangan, situasi di kawasan tersebut memanas. Setidaknya ada beberapa point tuntutan mereka yaitu, menolak

penggusuran belasan kampung di Pulau Rempang Galang, mendesak Polri dan TNI membubarkan Posko yang didirikan di Rempang Galang. Mereka juga meminta semua intimidasi kepada orang Melayu di Pulau Rempang dihentikan dan menuntut Presiden Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Tidak hanya itu massa juga meminta Presiden mencopot Muhammad Rudi, dari jabatannya sebagai Kepala BP Batam. "Serta kami meminta bebaskan warga Rempang Galang yang ditahan," kata orator aksi yang berasal dari Laskar Pembela Marwah Melayu.

Di sisi lain, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra menyalahkan peristiwa bentrokan antara polisi dengan warga di Rempang Batam akibat proses pengosongan lahan beberapa waktu lalu.

Dhahana menegaskan Wali Kota Batam, Kapolda Riau, dan stakeholder terkait perlu membangun dialog mendalam mengedepankan rasa kemanusiaan kepada masyarakat terdampak pengosongan lahan.

"Dapat kami pahami suasana kebatinan masyarakat terdampak pengosongan lahan di Rempang hari-hari ini. Karena itu, dialog mendalam menjadi penting agar peristiwa yang lalu tidak terulang kembali," kata Dhahana dalam keterangannya.

Dhahana menekankan, penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis merupakan hal penting dalam persaingan ekonomi global. Sebab, penerapan HAM dalam aktivitas bisnis akan memunculkan dampak positif terhadap citra perusahaan.

"Tentu kita semua tidak ingin iklim investasi yang telah baik di Batam ini mendapatkan citra negatif karena persoalan semacam kemarin," tutur dia. (wid,bis,ist/dya)

### RENCANA PENGEMBANGAN PULAU REMPIANG GALANG BATAM

Sumber: <https://bpbatam.go.id/>

 Pengembang PT Megah Elok Graha (MEG)

 Luas Wilayah Pengembang 17 Ribu Hektar, nilai investasi capai Rp 381 triliun

 Pengembangan untuk Industri, Jasa dan Pariwisata

 Terdapat 16 Kampung dengan luas 1500 Hektar, 7000 lebih penduduk (Data BPS)

### 7 ZONA PENEMBANGAN

- Rempang Integrated Industrial Zone
- Rempang Integrated Agro-Tourism Zone
- Rempang Integrated Commercial & Residential
- Rempang Integrated Tourism Zone
- Rempang Forest & Solar Farm Zone
- Wildlife & Nature Zone
- Galang Heritage Zone



# Buntut Singgung Capres Usia Muda, DPR Menilai Ketua MK Tak Etis

**JAKARTA**- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berbicara banyaknya pemimpin muda yang muncul di kancah internasional saat dirinya ditanya soal gugatan usia capres-cawapres. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustopa berharap ucapan Anwar itu bukan kode putusan gugatan soal batas usia capres dan cawapres.

"Terkait apa yang disampaikan ketua MK ya mudah-mudahan itu bukan sinyal ya, soal bahwa gugatan itu akan diputus sesuai dengan yang dimintakan, ketika dia ditanya terkait dengan soal gugatan," kata Saan kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

"Walaupun belum diputus tapi dia memberikan banyak contoh, gambaran, terkait dengan pemimpin-pemimpin muda. Jadi mudah-mudahan itu bukan sinyal ya," imbuhnya.

Saan mengingatkan hakim MK tak boleh menyampaikan opini ke publik yang berkaitan dengan perkara di MK. Dia mengatakan hakim MK juga tak boleh memberi kode soal apa putusan yang akan diucapkan.

"Karena memang sebelum diputus kan tidak boleh beropini dan juga tidak boleh memberikan tanda bahwa putusannya akan seperti apa gitu kan," ujar dia.

Saan menekankan pihaknya masih menunggu putusan MK mengenai perkara tersebut. Dia menjamin NasDem menghormati apapun yang menjadi keputusan MK.

"Tentu kita nunggu apa hasil putusan MK. Ini kan masih dalam proses ya di MK terkait gugatan UU Nomor 7 tahun 2017 terkait batas usia capres-cawapres, yang digugat. Tentu ya kita tunggu, nanti apapun hasil putusan tentu kita hormati," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, apa pun keputusan MK terkait gugatan tersebut kini sedang ditunggu. Dia mengaku heran, MK bisa memutuskan perkara gugatan usia capres-cawapres.

"Yang jelas dari beberapa kali pengalaman MK tidak memutuskan soal umur pejabat. Jadi yang saya tahu itu oleh MK dianggap open legal policy," kata Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Jazilul enggan berkomentar banyak mengenai pernyataan Anwar Usman itu memberikan sinyal khusus terkait putusan gugatan tersebut. "Saya tidak baca kode apa itu, nanti tetap atau dikabulkan," jelas Jazilul.

## Pemeriksaan Selesai, Tinggal Putusan

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, proses pemeriksaan



Harga beras kualitas medium tembus Rp12.700/Kg padahal HET berkisar Rp10.900 - Rp11.800/Kg tergantung wilayah. (ilustrasi.dok)

terhadap uji materi usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai. Katanya, putusan atas gugatan aturan tersebut tinggal diumumkan oleh MK. Ini disampaikan Anwar ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa mengenai proses uji materi terhadap syarat minimal usia capres-cawapres yang diatur Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal menunggu putusan," kata Anwar saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023).

Lantaran putusan terhadap uji materi aturan ini belum diketok, Anwar enggan bicara lebih lanjut. Namun, adik ipar Presiden Joko Widodo itu sempat menyinggung soal banyaknya anak muda yang menjadi seorang pemimpin sejak zaman Nabi Muhammad SAW. "Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun. Lalu, Muhammad Alfatih yang melawan kekuasaan Byzantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun," ujar Anwar.

Anwar juga mencontohkan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang mengemban jabatan di usia 42 tahun. Ada juga pemimpin di sejumlah negara lain yang usianya masih terbilang muda. Meski demikian, Anwar menyebut pernyataannya ini tak berhubungan dengan putusan MK. Dia bilang, ini hanya pendapat pribadi.

"Sekali lagi saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia capres-cawapres, tunggu putusan MK. Itu pendapat pribadi yang tentu saja bukan hanya adinda saja yang berpendapat seperti itu," katanya. Anwar menambahkan, apa pun putusan MK ke depan, pasti akan muncul pro dan kontra.

Dia menyebut, putusan MK tak bisa menyenangkan semua pihak. "Sampai kapan pun, termasuk sampai dunia kiamat pun, tidak ada sebuah putusan hakim yang memuaskan semua pihak. Itu sudah pasti pro kontra pasti ada," katanya.

Diketahui, saat ini, aturan tentang syarat usia minimal capres-cawapres yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tengah digugat ke MK. Pemohon perkara ini, mulai dari kalangan mahasiswa, pengacara, kepala daerah, hingga politisi. Dua partai yang mengajukan gugatan syarat minimal usia capres-cawapres yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.

Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Gugatan para pemohon ke MK beragam. Ada yang meminta MK mengubah syarat minimal usia capres-cawapres menjadi 21 sampai 65 tahun, ada pula yang meminta MK menurunkan syarat usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun dan 35 tahun. Selain itu, ada pemohon yang meminta MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asal punya rekam jejak sebagai kepala daerah. (wid,rls,ist/dya)

## GUGATAN USIA MINIMAL CAPRES-CAWAPRES (TEREGISTER)

- **PERTAMA**, perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Ketua Umum Giring Ganesha Djumaryo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dea Tunggaesti, hingga Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Lalu, Michael sebagai kuasa hukum. Gugatan ini diterima MK pada 9 Maret dan diregistrasi pada 16 Maret 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.
- **KEDUA**, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohana Murtika sebagai pemohon. Lalu, Desmihardi dan M. Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum. Gugatan ini diterima MK pada 2 Mei dan diregistrasi pada 9 Mei 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
- **KETIGA**, perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon. Lalu, Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman sebagai kuasa hukum. Gugatan diterima MK pada 5 Mei dan diregistrasi pada 17 Mei 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
- **KEEMPAT**, perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibirru Re A sebagai pemohon. Lalu, Arif Sahudi sebagai kuasa hukum. Gugatan diterima MK pada 3 Agustus dan diregistrasi pada 15 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
- **KELIMA**, perkara nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Arkanah Wahyu Re A sebagai pemohon. Lalu, Arif Sahudi sebagai kuasa hukum. Gugatan diterima MK pada 4 Agustus dan diregistrasi pada 15 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.
- **KEENAM**, perkara nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung sebagai pemohon. Lalu, Irwan Gustaf sebagai kuasa hukum. Gugatan diterima MK pada 7 Agustus dan diregistrasi pada 16 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.
- **KETUJUH**, perkara nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Guy Rangga Boro sebagai pemohon. Lalu, Leonardo Sitorus sebagai kuasa hukum. Gugatan diterima MK pada 7 Agustus dan diregistrasi pada 16 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.
- **KEDELAPAN**, perkara nomor 96/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Riko Andi Sinaga sebagai pemohon. Lalu, Purgatorio Siahaan sebagai kuasa hukum. Gugatan diterima MK pada 7 Agustus dan diregistrasi pada 21 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.
- **KESEMBILAN**, perkara nomor 100/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Hite Badeggan Lumbantoran sebagai pemohon. Gugatan diterima MK pada 7 Agustus dan diregistrasi pada 21 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

# Geopark Ijen Dikukuhkan Sebagai UNESCO Global Geopark

## Gubernur Khofifah: Kekayaan Alam Jatim Mendunia



**SURABAYA-** UNESCO secara resmi mengukuhkan Geopark Ijen Jawa Timur Indonesia sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dalam konferensi internasional ke-10 UGGp yang dilaksanakan di Marrakech, Maroko, Sabtu (9/9/2023).

Pengukuhan tersebut dilakukan dengan penyerahan sertifikat Geopark Ijen sebagai Global Geopark Network Institutional Member for period 2023-2026 kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kegiatan tersebut Gubernur Khofifah diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Dr Hudiono didampingi Kadis ESDM Provinsi Jawa Timur, Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso.

Atas diakuinya Geopark Ijen UGGp

sebagai taman bumi dunia, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat Banyuwangi dan Bondowoso yang telah menjaga kelestarian Ijen.

"Alhamdulillah, Geopark Ijen berhasil menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp). Terima kasih kepada semua pihak yang telah peduli dan menjaga kelestarian alam di Ijen. Capaian ini buah kerja keras mereka semua," kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (11/9/2023).

"Dengan dikukuhkannya Geopark Ijen sebagai UNESCO Global Park, maka akan semakin membawa kekayaan alam Jatim mendunia. Kami optimis dengan

pengukuhan ini wisatawan dari berbagai penjuru dunia akan berbondong-bondong datang ke Ijen," tambahnya.

Gubernur Khofifah mengatakan bagi Jatim, Ijen UGGp tidak hanya sekadar wisata, lebih dari itu, Ijen merupakan salah satu kekayaan alam bagi masyarakat Jatim, bahkan Indonesia.

Terletak di Provinsi Jawa Timur dan berada dalam dua wilayah kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Ijen UGGp memiliki international outstanding value berupa keberadaan Bluefire dan Danau Terasam di dunia.

Didukung potensi keindahan sisa letusan Geologi, keberadaan flora

fauna endemik, dan budaya lokal, Ijen UGGp selalu dapat menyerap banyak wisatawan setiap tahunnya.

Meski memiliki banyak keunggulan, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa tak mudah untuk bisa meloloskan Ijen dalam UGGp. Terutama karena UGGp memiliki kriteria ketat yang harus dipenuhi dalam mengelola sumber daya geologi dan nilai budaya.

"Boleh dibilang bahwa penetapan Ijen UGGp ini menempuh perjuangan panjang. Proses pengajuan ini kita mulai sejak penyampaian Letter of Intent (LOI) ke sekretariat UGGp melalui keputusan komite nasional geopark Indonesia (KNGI) pada 30 Juli 2020 lalu," tegasnya.

Dalam mendukung keberadaan Geopark di Jawa Timur, Gubernur Khofifah juga membentuk Forum Geopark Jawa Timur lewat keputusan Gubernur Jatim No. 188/143/KPTS/013/2023 tentang Forum Geopark di Jatim.

Melalui forum itu, semua pemangku kepentingan bertukar pengalaman untuk proses pengajuan dan penilaian global geopark. Mulai dari penyusunan rencana pengembangan hingga evaluasi terhadap kegiatan pengembangan geopark.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 188/144/KPTS/013/2023

tentang Pengelola Geopark Ijen periode Tahun 2023-2024. "Ada pula pula Geopark Youth Forum sebagai mitra dari Badan Pengelola Geopark. Tujuannya adalah agar semakin banyaknya kaum muda yang lebih peduli terhadap lingkungan dan perkembangan perekonomian kreatif di daerah asalnya," terangnya.

Kemudian, tahun lalu dalam proses assessment, Geopark Ijen memperoleh nilai tertinggi dengan skor

873. Hingga saat ini capaian skor tersebut masih merupakan capaian tertinggi diantara aspiring UNESCO Global Geopark di Indonesia yaitu Geopark Belitung dengan nilai skor 850, maupun Geopark Maros Pangkep dengan nilai skor 869.

Dengan ditetapkannya Geopark Ijen sebagai UGGp, Gubernur Khofifah berharap daya tarik wisata Gunung Ijen akan terdongkrak. Terutama untuk wisatawan mancanegara yang pada akhirnya juga berdampak pada perekonomian warga setempat dan Jawa Timur pada umumnya.

Saat ini di Provinsi Jawa Timur ada dua geopark berstatus UGGp yakni Gunungsewu dan Ijen. Satu geopark berstatus Nasional (Geopark Bojonegoro), dan beberapa berstatus aspiring untuk diajukan tingkat Nasional.

Beberapa geopark yang berstatus aspiring untuk diajukan ke tingkat Nasional tersebut ialah Bromo Tengger Semeru (BTS) meliputi Kab Malang, Kab Pasuruan, Kab Probolinggo, dan Kab Lumajang Bumi Manusia Wajak (Wajakensis) di Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek, dan Karst di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar. Kemudian ada Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Geopark Kabupaten Magetan, dan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. (ADV)



## Jokowi Pastikan Stok Beras RI Aman, Harga Naik Terdampak Pasar Dunia

**BOGOR-** Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih aman di tengah fenomena kekeringan El Nino. Apalagi, akan ada pemasukan beras impor sebanyak 400 ribu ton.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat melakukan tinjauan dan pemberian bantuan sosial di gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023). Tinjauan ini dilakukan guna memastikan stok beras ada di gudang Bulog.

Jokowi mengimbau masyarakat tak perlu khawatir akan stok beras, pasalnya stok beras pemerintah saat ini bakal mencapai 2 juta ton memenuhi seluruh kuota impor yang diputuskan. "Yang paling penting

stoknya ada. Barangnya ada, berasnya ada. Setelah yang di dalam gudang 1,6 juta dalam perjalanan 400 ribu sehingga akan ada stok 2 juta," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers.

Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah memulai pemberian bantuan pangan beras ke masyarakat mencapai 210 ribu ton melalui Bulog. Bantuan itu akan berlangsung mulai September ini hingga November supaya bisa meredakan kenaikan harga beras.

"Kalau stoknya kita lihat masih (ada) nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan meskipun

inflasi kita masih terjaga di 3,2%," kata Jokowi.

Selain itu Jokowi juga mengungkapkan impor beras sebesar 400 ribu ton itu berasal dari berbagai negara. Salah satunya adalah Kamboja. "Iya (dari Kamboja) meskipun tidak semuanya," kata Jokowi tanpa menjelaskan besaran beras yang diimpor dari Kamboja.

Selain itu ia juga masih belum mau membeberkan asal beras impor selain Kamboja. Jokowi menyebut sudah berbicara dengan banyak pimpinan negara terkait harga beras kepala negara Bangladesh, Kamboja, India dan China.

Setelah itu negosiasi akan

dilanjutkan oleh Bulog. Salah satu hal yang masih menjadi dinegosiasikan terkait harga. "Saya sudah berbicara dengan banyak tapi kan belum putus," kata Jokowi.

"Kalau barangnya ada, kita antarpresiden, dengan Perdana Menteri sudah oke tapi harganya nggak sambung, ya kan gak ketemu. Ini apapun tetap Bulog masalah harga tetap menjadi salah satu dalam negosiasi transaksi itu jadi atau nggak jadi," tambah Jokowi.

Sebagaimana diketahui, saat ini harga beras dari yang sebelumnya dengan harga termurah Rp 8 hingga 9 ribu per liter, kini mengalami kenaikan mencapai Rp 10 hingga 11 ribu per liter. (wid,rls/dya)

# Kejagung Tahan Tiga Tersangka Kasus BTS

**JAKARTA** - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) atau kasus BTS Kominfo.

Ketiga tersangka tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti, Elvano Hatorangan (EH), Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan (JS) dan Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Muhammad Feriandi Mirza (MFM).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan, ketiga orang itu telah memenuhi alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka.

"Ketiga orang tersebut setelah kami lakukan pemeriksaan, dinyatakan cukup alat bukti untuk dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan," kata Kuntadi dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Senin (11/9/2023).

Adapun peran masing-masing tersangka, kata Kuntadi, untuk EH diduga telah memanipulasi kajian proyek dengan iming-iming apabila diberikan waktu perpanjangan maka proyek dapat selesai. "Belakangan terbukti perpanjangan diberikan, nyatanya pekerjaan tersebut tidak selesai," kata Kuntadi.

Kuntadi mengatakan, EH diduga memberikan hasil kajian yang tidak menggambarkan kondisi riil dari penangan proyek BTS itu. Sedangkan untuk Jemy Sutjiawan, Kuntadi mengatakan, yang bersangkutan diduga telah menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan proyek tersebut.

"JS memberikan sekumlah uang kepada AAL, IH, GMS, dan MYM dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunann infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5," kata Kuntadi.

Sementara untuk tersangka Muhammad Feriandi Mirza dituduhkan melakukan pengkondisian agar nama perusahaan tertentu dijadikan pelaksana proyek. "Ketiga orang tersebut diduga telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Kuntadi.

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka di antaranya eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif.

Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Tenaga



Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi. (Puspenskum Kejagung)

Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; Komisariss PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan; dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.

Di antara nama-nama itu saat ini telah menjadi terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat. Hanya Yusrizki dan Windi yang belum dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini statusnya masih tersangka.

Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi BTS Kominfo, Windi Purnama telah lengkap atau P21. Karena itu, jaksa penyidik telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kepada jaksa penuntut umum untuk persiapan sidang dakwaan.

"Terkait dengan tersangka Windi, sudah tahap 2 dari penyidik kepada penuntut umum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana saat konferensi pers, Senin (11/9/2023).

Ketut mengatakan, dengan telah dilakukannya tahap 2, maka tersangka Windi tinggal menunggu waktu untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Tersangka WP dalam waktu 20 hari ke depan, akan segera kami limpahkan ke pengadilan," kata Ketut.

Windi Purnama merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan selaku Komisariss PT Solitech Media Sinergy. Dalam kasus ini, Windi diduga menjadi perantara Irwan dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Windi bertindak sebagai orang yang membagikan dugaan korupsi BTS ke banyak pihak salah satunya uang operasional untuk eks Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebesar Rp

500 juta setiap bulannya. Windi menyerahkan uang untuk Johnny sebanyak 20 kali mulai Maret 2021-Oktober 2022 uang itu diserahkan kepada staf Johnny G. Plate, Happy Endah Palupy dengan total keseluruhan Rp 10 miliar.

Kejaksaan Agung menjerat Windi dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kejagung memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Berawal dari surat perintah penyelidikan kasus yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi, dengan nomor surat Print-23/F.2/Fd.1/07/2022 per 18 Juli 2022.

Kejagung juga menetapkan uang senilai Rp 27 miliar yang diserahkan oleh pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, sebagai barang bukti untuk perkara atas nama Windi Purnama. Windi merupakan pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Irwan untuk membagikan uang korupsi tersebut ke berbagai pihak.

"Mengetahui uang Rp 27 miliar, statusnya telah disita oleh penyidik dalam perkara WP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan, mengenai siapa pemberi dan untuk apa uang itu, akan terbuka di persidangan. "Nanti seperti apa, kita lihat nanti proses persidangan, yang penting transparan dan keterbukaan," kata Kuntadi di tempat yang sama

Kuntadi mengatakan, penyidik

Jampidsus Kejagung telah memasukkan kaitan uang Rp 27 miliar tersebut dalam berkas perkara Windi Purnama. "Tentang apa bagaiannya sudah kami lengkapkan dalam perkaranya. Nanti di sidang mari kita lihat sejauh mana kaitannya itu," kata Kuntadi.

Sebelumnya, Maqdir menyerahkan uang senilai US\$ 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar ke Kejagung pada 13 Juli 2023. Dia mengungkapkan uang itu diserahkan kepadanya oleh salah seorang pihak swasta. Namun, Maqdir ogah membeberkan nama pihak swasta yang menyerahkan uang tersebut.

Belakangan Maqdir menyatakan bahwa uang itu milik Irwan. Dia menyatakan pihak yang menyerahkan uang tersebut menyatakan uang itu untuk mengurus keperluan Irwan.

Irwan disebut mengumpulkan Rp 243 miliar dari para vendor proyek BTS. Uang itu dikumpulkan untuk mengintervensi penyelidikan kasus BTS yang dilakukan oleh Kejagung dan juga untuk menutup pengusutan kasus ini di DPRRI.

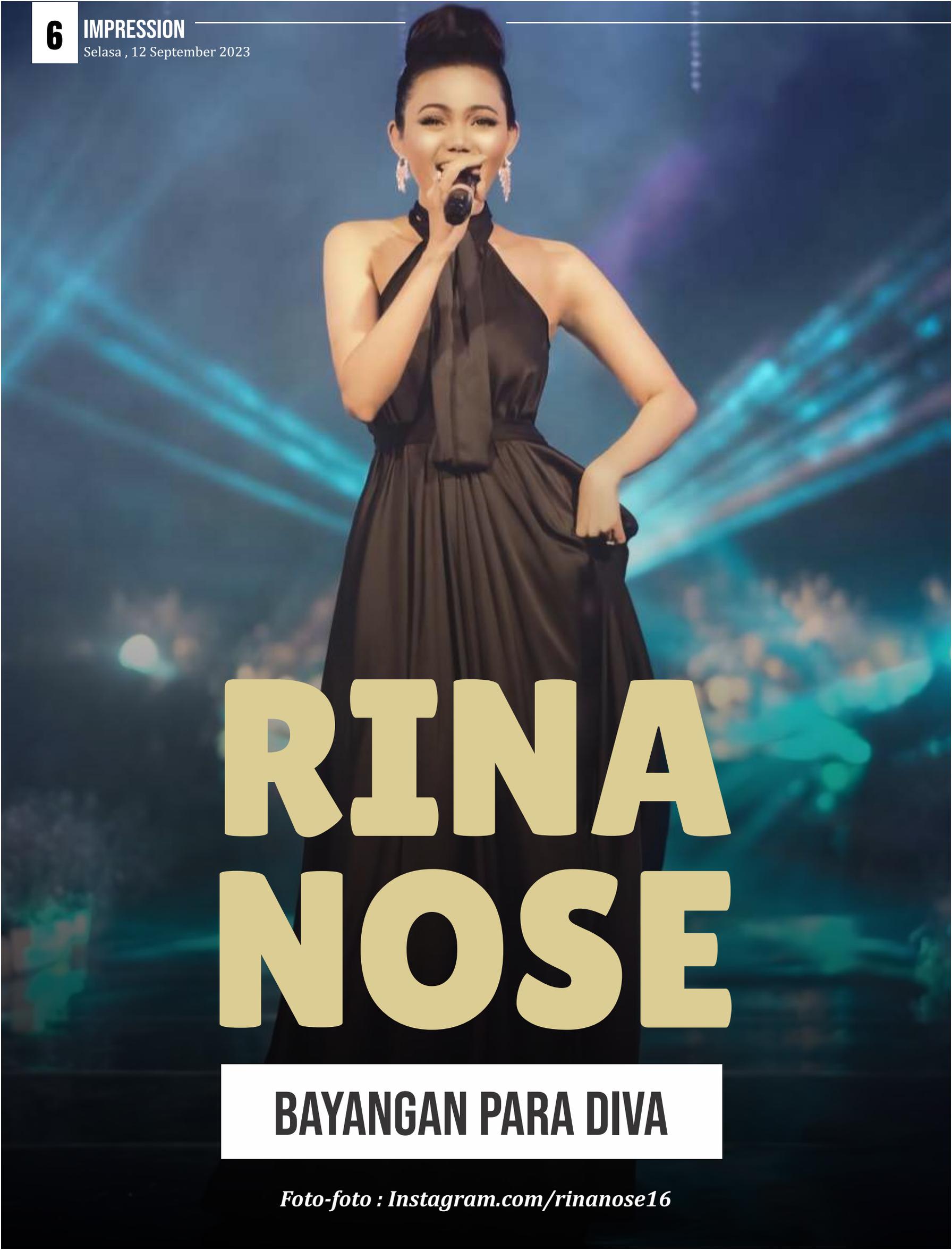
Untuk mengalirkan dana tersebut, Irwan disebut menggunakan jasa Windi Purnama dan perusahaannya, PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Windi merupakan Direktur Utama di perusahaan tersebut. Selain Irwan, Windi juga disebut berkaitan dengan Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti), Anang Achmad Latif yang juga telah menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Kepada penyidik, Irwan dan Windi sempat menceritakan penyerahan uang ke beberapa pihak. Diantaranya adalah kepada politikus Golkar Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menurut Irwan, dalam berkas pemeriksaan yang sempat dilihat Tempo, Dito menerima uang sebesar Rp 27 miliar pada periode November hingga Desember 2022. Saat itu, Dito masih menjadi staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar.

Dito telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dia membantah pernah menerima uang sebesar Rp 27 miliar tersebut.

Sementara Windi mengaku sempat menyerahkan uang untuk operasional eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebesar Rp 500 juta setiap bulannya. Dia mengaku menyerahkan uang untuk Johnny sebanyak 20 kali mulai Maret 2021-Oktober 2022. Uang itu diserahkan melalui seseorang bernama Yunita yang lalu mengalirkan kepada staf Johnny bernama Happy Endah Palupy. Johnny disebut menerima total Rp 10 miliar. (lut/tempo/dya)



# RINA NOSE

**BAYANGAN PARA DIVA**

*Foto-foto : [Instagram.com/rinanose16](https://www.instagram.com/rinanose16)*

**ARTIS** Rina Nose (39) selama ini lebih dikenal sebagai komedian dan pembawa acara. Ia juga jago menirukan suara dari artis lain, melakukan impersonate.

Namun, dalam Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia 2023 yang digelar di Jakarta, pekan lalu, ia tak hanya bisa membuat pengunjung tergelak, tetapi juga menikmati suara merdunya. Rina tampil sebagai "diva".

Dalam iringan Magenta Orchestra yang dipimpin Andi Rianto, presenter bernama lengkap Nurina Permata Putri itu tampil bak diva, dan membuat decak kagum penonton, karena melantunkan suara penyanyi Agnez Mo, termasuk dengan penguasaan teknik vokal prima.

Ia melantunkan "Karena Ku Sanggup" dengan sangat baik. Sangat mirip dengan suara dan teknik Agnez Mo.

Rina melanjutkan penampilannya, menirukan suara diva Vina Panduwinata dengan "Burung Camar" nan centil memikat serta melantunkan "Berharap Tak Berpisah" dari Reza Artamevia, termasuk dengan suara beratnya.

Pada bagian akhir medley-nya, ia menyanyikan lagu "Cinta" karya musisi kawakan Titiok Puspa dengan suara khas penyanyi senior bernama asli Sudarwati itu. Titiok Puspa berkesempatan pula tampil menemani Rina Nose.

Titiok Puspa (86) memuji Rina, yang disebutnya bertalenta luar biasa. Andi Rianto menilai, Rina malam itu tampil bak diva sesungguhnya. Rina menjadi bayangan para diva. Cukup mengundang Rina Nose, sudah bisa menikmati suara sejumlah diva di negeri ini.

Rina juga menjadi pendamping Titiok Puspa, yang disebut sebagai "induk para diva". Keduanya menembangkan karya Titiok, "Marilah Kemari" dan "Apanya Dong" dengan rancak.

**Profil**

Nurina Permata Putri atau biasa panggil Rina Nose lahir pada 16 Januari 1984 di Bandung.

Rina merupakan anak dari pasangan Tatang Sulaeman dan Ellisa Herliani. Rina memiliki kembaran yang bernama Krisna. Wanita asal Bandung ini merupakan alumni dari SMA Pasundan 2 Bandung sebelum melanjutkannya di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung.

Ia bisa dibilang artis multi talent, saat ini ia aktif di salah satu acara televisi swasta sebagai presenter. Selain cantik, ia dikenal cukup pintar ketika jadi presenter. Tidak hanya itu, ia juga bisa menjadi seorang komedian yang sering mengundang tawa para penonton.

Untuk kehidupan pribadinya, saat menginjak usia 28 tahun, Rina menikah dengan Ridwan Federani di Bali pada 2012. Sayangnya pernikahannya seumur jagung. Pada 2013 Rina menggugat cerai sang suami, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Sebagai selebritis tentunya Rina pernah terkena beberapa gosip

apalagi ia seorang janda. Ia dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Di antaranya dengan Saipul Jamil dan Fakhru Razi.

Namun, dalam perjalanan hidupnya, pada September 2016, Rina mengambil keputusan berani dalam berbusana. Rina Nose memutuskan menutup seluruh auratnya.

Penampilan barunya ini terlihat pada saat dia mengisi acara di salah satu stasiun televisi swasta atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Tak tanggung-tanggung dengan keputusan terbesarnya ini, ia meminta doa agar terus bisa menjalankan perintah Allah dan tetap istiqomah.

Tidak hanya itu, Rina pun menghapus seluruh foto laman media sosialnya di Instagram. Ada sekitar 400 foto sebelum dia berhijab. Bukan hanya penampilan di atas panggung atau di depan kamera, Rina juga menjaga sikap dengan orang-orang sekitar. Bahkan ia pun seleksi dalam memilih materi lawakannya.

Perubahan penampilannya tak membuat ia minder. Ia beraktivitas seperti biasa. Candaannya masih ditunggu penggemarnya. Rina Nose pun tetap laris manis di layar kaca (Kompas-berbagai sumber)



# BADAN LEMAS

# PADAHAL

# SUDAH MAKAN,

# KENALI

# 5 PENYEBABNYA



**MAKAN** dapat meningkatkan energi di dalam tubuh sehingga terhindar dari rasa lemas. Namun, kenapa badan lemas padahal sudah makan?

Ternyata, rasa lemas yang muncul setelah makan adalah hal yang wajar karena merupakan proses pencernaan yang normal.

Namun, rasa lemas yang dialami juga bisa jadi merupakan gejala dari masalah kesehatan tertentu, seperti diabetes dan gangguan tiroid.

Untuk lebih jelasnya, ketahui penyebab badan lemas padahal sudah makan dan cara mengatasinya berikut ini.

## KENAPA BADAN LEMAS PADAHAL SUDAH MAKAN?

Tubuh yang lemas setelah makan umumnya adalah kondisi yang normal karena merupakan proses pencernaan alami di dalam tubuh.

Makanan yang dikonsumsi akan dipecah menjadi glukosa oleh sistem pencernaan dan diubah menjadi energi.

Namun, tubuh juga akan memproduksi hormon serotonin yang akan meningkatkan rasa lemas setelah makan.

Selain merupakan proses pencernaan makanan yang alami, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat membuat Anda merasa lemas setelah

makan.

Disarikan dari Sleep Foundation dan Prevention, berikut adalah beberapa penyebab badan lemas padahal sudah makan.

### Mengonsumsi jenis makanan tertentu

Beberapa jenis makanan yang dikonsumsi akan memicu rasa kantuk, seperti makanan yang mengandung lemak, karbohidrat tinggi, dan triptofan.

Meskipun begitu, masing-masing individu akan memiliki reaksi yang berbeda ketika mengonsumsi beberapa jenis makanan tersebut.

### Makan dengan porsi besar

Selain mengonsumsi jenis makanan tertentu, makan dengan porsi besar juga akan membuat Anda merasa lemas. Pasalnya, tubuh memerlukan lebih banyak energi untuk memecah makanan yang dikonsumsi sehingga akan mudah lelah setelah makan.

### Memiliki intoleransi makanan

Intoleransi makanan tidak hanya akan membuat perut sakit atau diare, tetapi juga bisa membuat tubuh terasa lemas.

Kondisi ini dapat terjadi ketika tubuh tidak bisa mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi sehingga membuatnya lebih lemas.

### Mengalami gangguan tidur

Rasa lemas yang muncul meskipun sudah makan dapat disebabkan oleh gangguan tidur yang dialami.

Gangguan tidur dapat membuat menurunkan kualitas tidur dan mencegah Anda untuk mendapatkan waktu tidur yang cukup sehingga tubuh cenderung terasa lemas dan lelah di siang hari.

### Memiliki masalah kesehatan tertentu

Tubuh yang terasa lemas meskipun sudah makan bisa jadi merupakan gejala dari masalah kesehatan tertentu.

Beberapa masalah kesehatan yang dapat membuat Anda merasa lemas, seperti diabetes, anemia, gangguan tiroid, dan tekanan darah rendah.

Selain mengidap masalah kesehatan tertentu, beberapa jenis obat yang dikonsumsi juga bisa memberikan efek samping berupa badan yang lemas meskipun sudah makan.

Meskipun begitu, mengetahui alasan kenapa badan lemas padahal

sudah makan juga diperlukan agar Anda bisa segera mencari bantuan medis ketika diperlukan.

Hindari melakukan diagnosis pribadi dan segera ke dokter ketika tubuh tiba-tiba terasa lemas serta mengganggu aktivitas sehari-hari agar bisa mendapatkan perawatan serta pengobatan yang tepat (Kompas)

## BEBERAPA CARA MENGATASI BADAN LEMAS PADAHAL SUDAH MAKAN

- Menghindari makanan mengandung lemak dan karbohidrat tinggi, serta menjaga agar porsinya tidak berlebihan
- Tidur sebentar di siang hari, atau selama 15-30 menit sebelum jam 3 sore
- Mendapatkan paparan cahaya, baik dari lampu atau cahaya matahari
- Meningkatkan kualitas tidur di malam hari dan mendapatkan waktu tidur yang cukup, atau setidaknya tujuh jam setiap malam
- Menghindari kebiasaan makan terlalu larut atau mendekati waktu tidur
- Berolahraga secara rutin
- Minum air putih untuk menghindarkan dari dehidrasi

# IDENTITAS DIGITAL TINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN

**PENYEDIA** layanan identitas digital VIDA mengungkapkan hasil riset bahwa penggunaan identitas digital pada layanan digital terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dengan fungsi menjaga keamanan data pribadi, meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta mempermudah sekaligus mempercepat layanan.

AVP Partner Business Development and Marketing Partnership VIDA Pribadi Hasto Kusumo, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan hal itu menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan digital bagi pertumbuhan ekosistem digital sebagai kunci dalam akselerasi transformasi digital.

"Kepercayaan digital merupakan kunci penting dalam akselerasi transformasi digital. Penerapan perlindungan data pribadi memiliki peran yang besar dalam peningkatan kepercayaan digital karena melibatkan keamanan dan integritas informasi pribadi individu," ucap Pribadi.

Dari hasil riset tersebut, sebanyak 88 persen perusahaan di Indonesia merasa perlu melakukan adopsi teknologi identitas digital guna mendorong pertumbuhan bisnis.

Selain itu, dia mengatakan penerapan perlindungan data pribadi pada layanan digital juga dapat memitigasi risiko terkait penyalahgunaan data atau kebocoran informasi, memberikan kepastian hukum bahwa segala layanan berjalan sesuai etik, hingga membuka peluang ekspansi bisnis.

Pengalaman konsumen dalam transaksi elektronik khususnya terkait perlindungan data menjadi perhatian penting, terlebih ketika Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan.

Konsumen dapat beralih, mengurangi, hingga berhenti menggunakan layanan digital sama sekali

jika mendapatkan pengalaman negatif terkait keamanan data. Oleh karena itu, menurut Vida, transformasi layanan digital diperlukan guna meningkatkan kepercayaan konsumen.

Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), VIDA hadir sebagai solusi transformasi digital yang aman dengan kepastian penerapan perlindungan data pribadi berlandaskan hukum UU PDP yang mencakup pengendali dan pemrosesan data pribadi, penyimpanan data, dokumen tata kelola, keamanan informasi dan tinjauan berbagai data, serta kendali akses.

Tidak hanya berlandaskan UU PDP, VIDA pun memastikan kebijakan privasi seluruh layanannya sesuai dengan Permenkominfo 11/2022 dan peraturan sektoral lainnya, serta secara rutin menjalani audit eksternal mengenai praktik keamanan informasi.

"Setiap harinya, kami melayani lebih dari 1,8 juta verifikasi wajah online dan melakukan 100 transaksi per detik. VIDA berkomitmen mendorong akselerasi digital dengan

memberikan layanan verifikasi identitas online, tanda tangan digital, serta autentikasi yang mudah melalui jaminan privasi dan keamanan sesuai dengan ketentuan regulasi," kata Pribadi.

Teknologi VIDA menjamin keamanan data pribadi pengguna layanan digital di berbagai industri, mulai dari kesehatan, asuransi, transportasi online, uang elektronik, perdagangan elektronik, pinjaman berbasis online, perbankan, pembiayaan, hingga safe travel.

Hal itu guna memberikan kepercayaan bagi pengguna dalam menghadapi digitalisasi yang kian kompleks.

Pada saat penerapan perlindungan data pribadi dilakukan secara optimal, percepatan transformasi digital akan semakin terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Sebelumnya VIDA berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk go digital lewat layanan identitas digital yang aman dan terpercaya.

VIDA akan membantu para pelaku UMKM untuk go digital lewat penerbitan identitas digital yang terverifikasi.

Dengan adanya identitas digital



tersebut, kata dia, pelaku UMKM akan lebih mudah dalam mengakses ekosistem digital, seperti layanan pinjaman atau kredit melalui platform teknologi finansial (tekfin).

VIDA, yang telah menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang terdaftar di Kementerian komunikasi dan Informatika, memiliki dua layanan unggulan, yakni VIDA Verify yaitu layanan verifikasi identitas secara daring dan VIDA Sign yang merupakan layanan tanda tangan elektronik atau digital (Ant)



"Kepercayaan digital merupakan kunci penting dalam akselerasi transformasi digital. Penerapan perlindungan data pribadi memiliki peran yang besar dalam peningkatan kepercayaan digital karena melibatkan keamanan dan integritas informasi pribadi individu,"

## Pribadi Hasto Kusumo

AVP Partner Business Development and Marketing Partnership VIDA

HARIAN  
**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

**MEDIA TERVERIFIKASI**



**BIRO : SURABAYA :** LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO :** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN :** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK :** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI) :** IMAN SANTOSO, | **MADIUN :** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR :** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK :** ANNGA PRAYOGA

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# SEMPROTKAN PARFUM AGAR WANGINYA MAKSIMAL

**KETIKA** memakai wewangian atau parfum sebelum bepergian, mungkin kerap terlibat di benak berapa kiranya jumlah semprotan yang baik agar wangi dapat terpancar dengan maksimal, salah seorang pendiri HMNS Karina Innadindya pun memberikan jawabannya.

Ditemui di Jakarta, Rabu (6/9), Karina mengatakan bahwa jumlah semprotan parfum yang tepat adalah sebanyak tujuh kali.

Ketujuh semprotan dapat diarahkan di kedua nadi lengan, dua semprotan di leher bagian kanan dan kiri, kedua lipatan bagian belakang lutut, dan semprotan terakhir diarahkan ke udara tepat di atas kepala, biarkan cairan jatuh ke tubuh.

"Titik-titik tersebut adalah bagian tubuh yang cukup hangat sehingga parfum dapat berevaporasi atau menguap dan aromanya dapat tercium lebih maksimal," kata Karina menjelaskan.

Selain ketujuh titik tersebut, ada satu semprotan lagi yang dapat membuat wangi dari parfum tahan lebih lama, yakni pada pakaian.

Karina menyebut pakaian dapat memunculkan wangi yang lebih tahan lama daripada kulit. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua parfum baik bagi bahan pakaian, beberapa parfum justru dapat menyisakan bercak.

"Kalau ingin wanginya lebih awet

lagi, semprotkan juga di baju karena dia tidak akan mudah menguap dan hilang seperti di kulit. Itu sebabnya baju yang disemprot parfum wanginya bisa berhari-hari," kata Karina.

Sebelum menyemprotkan parfum ke pakaian, Karina menyarankan untuk mengecek apakah wewangian akan menimbulkan bercak. Dia juga menganjurkan untuk menggunakan parfum sehabis mandi dan setelah mengaplikasikan body lotion.

Cara itu, menurut dia, akan membuat kulit menjadi lebih lembab dan memudahkan parfum untuk menempel lebih lama. Dia menyebut dengan menerapkan kedua cara itu, parfum dapat lebih awet hingga dua jam dari biasanya.

"Kalau bisa pilih lotion yang wanginya senada dengan parfum, atau lebih bagus yang tidak ada wanginya sama sekali agar aroma parfum tidak tercampur," ujar Karina

Beberapa trik praktis yang dikutip dari laman MindBodyGreen ini dapat membantu parfum Anda bertahan lebih lama.

## 1. Oles atau semprot parfum pada titik nadi

Sebenarnya ada alasan fungsional mengapa kita cenderung mengoleskan atau menyemprot parfum pada titik-titik nadi, seperti bagian dalam pergelangan tangan dan siku, di belakang telinga, di leher, bagian belakang lutut. Pada titik-titik nadi, lapisan kulit cenderung lebih tipis sehingga lebih dekat dengan aliran darah dan panas tubuh,

## 2. Jangan menggosok parfum di pergelangan tangan

Cara ini sebetulnya salah. Menggosok parfum merupakan kesalahan besar yang sejak dahulu dilakukan banyak orang. Menggosok parfum dapat lebih cepat membakar lapisan pertama pada parfum, sehingga aroma parfum lebih cepat hilang. Selain itu, menggosok parfum juga dapat merusak partikel-partikel yang terdapat di dalam parfum dan dapat mengubah aroma hingga ketahanan parfum.

## 3. Semprotkan di area dada

Selain titik nadi, area lain yang bisa membantu memancarkan aroma parfum dengan lebih kuat adalah area dada yang dekat dengan jantung (Ant)



"Kalau ingin wanginya lebih awet lagi, semprotkan juga di baju karena dia tidak akan mudah menguap dan hilang seperti di kulit. Itu sebabnya baju yang disemprot parfum wanginya bisa berhari-hari,"

**KARINA  
INNADINDYA**  
Pendiri HMNS



## Mengemuka, Usulan .... (dari hal 1)

**USULAN** Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa para bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sorotan banyak pihak.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhan tak sepakat dengan usulan koleganya itu. Menurutnya, tak mungkin capres-cawapres diperiksa tanpa ada kasus yang jelas.

"Itu kan aneh, itu semangatnya bagus tapi logikanya aneh. Terus terang sahabat saya Pak Sahroni mungkin dia tidak terlalu memahami alur penyelidikan pidana dalam KUHP. Kalau dalam KUHP itu pidananya dulu dicari baru orangnya," kata Habiburokhan di Rumah Relawan Prabowo, Jakarta Barat, Senin (11/9/2023).

Dia mengatakan KPK hanya bisa memanggil seseorang bila sudah ada kasus yang mengarah kepada yang bersangkutan. "Jadi bukan orangnya dulu diperiksa dicari peristiwanya apa," tutur dia.

Dia menyebut usulan itu juga bisa menimbulkan penegakan hukum yang tidak jelas. Sebab, kesimpulan KPK saat ini, akan menjadi keputusan capres cawapres tertentu untuk menjadi alasan di kemudian hari jika benar-benar tersandung kasus hukum.

"Yang kedua ini bisa menimbulkan bahaya bagi penegakan hukum bisa jadi orang yang calon yang beneran melakukan tindak pidana korupsi lalu KPK melakukan pemeriksaan tapi belum ketemu dan dinyatakan bersih," ucapnya.

"Maka orang tersebut ketika kasusnya terungkap di kemudian hari akan menggunakan produk KPK di pemilu ini sebagai senjata untuk membela diri, kan bahayanya di situ. Jadi apa yang disampaikan Pak Sahroni itu sangat bahaya. Bisa melindungi koruptor," tutupnya.

Hal senada dikatakan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka menilai tak ada hal yang mendesak untuk KPK melakukan pemeriksaan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden. PAN menyebut KPK bukanlah lembaga cap stempel untuk menyatakan seorang bersih dari korupsi.

"Tidak ada urgensinya, karena KPK bukan lembaga cap stempel clean and clear. Tetapi lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia," ujar Waketum PAN Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023).

Viva mengatakan KPK bekerja berdasarkan undang-undang. KPK, menurutnya, akan melakukan pengusutan kasus jika adanya indikasi terjadinya korupsi. "KPK bekerja berdasarkan undang-undang. Jika ada dugaan kerugian uang negara dan ada bukti awal terhadap kasus tersebut, maka KPK dapat menjalankan tugas pokok dan kewenangannya," tutur dia.

"Jika belum ada bukti material atas keterlibatan bakal kandidat maka

tidak perlu KPK melakukan pemeriksaan karena KPK adalah lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, bukan lembaga cap stempel clean and clear," imbuhnya.

Lebih lanjut, Viva meyakini KPK terus menjaga kredibilitasnya. Menurutnya KPK adalah lembaga yang mandiri. "PAN percaya bahwa KPK akan terus menjaga kredibilitas, integritas, dan profesionalitas sebagai lembaga yang mandiri, bekerja untuk menegakkan keadilan hukum dan kemanusiaan," tutur Viva

Ahmad Sahroni sebelumnya mengusulkan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi.

"Sebagai pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (9/9/2023).

Sahroni menyebut, jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutkan kepada para pasangan calon. Dia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, dan Prabowo dengan Food Estate.

Sahroni pun ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan saksama. Sebab, dia menilai ini akan menjadi langkah yang fair bagi seluruh pihak dan tentunya baik untuk publik.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menanggapi adanya usulan mengenai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal wakil calon presiden (bacawapres) diperiksa KPK terlebih dahulu sebelum maju ke Pilpres 2024. "PDI-P mendukung seluruh upaya dalam penegakan hukum tersebut, baik dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, kemudian aparat kepolisian," kata Hasto.

KPK pun merespons usulan Sahroni. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan pandangan Sahroni. Namun ia menyebut persoalan politik bukan ranah KPK. "Siapa pun bebas berpikir dan berpendapat. Namun kami tidak ingin menanggapi persoalan politik karena itu bukan wilayah tugas pokok dan fungsi KPK," kata Ali.

Ali mengatakan pemanggilan saksi di KPK tidak dilakukan secara mendadak. Ada proses dan dasar hukum yang kuat dari pemanggilan tiap saksi.

Pemanggilan tiap saksi itu, kata

Ali, juga harus telah melalui serangkaian proses penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim penyelidik dan penyidik KPK.

"Sebagai pemahaman saja dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya. Sangat tidak tepat bila penegak hukum tiba-tiba melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan seseorang tanpa ada proses-proses yang sudah dilalui sebelumnya," jelas Ali.

## Mahfud: Maju atau Terganggu

Di sisi lain, rencana KPU memajukan jadwal pendaftaran dari semula 19 Oktober 2023 menjadi 10 Oktober 2023 menguat. Apalagi, masa pendaftaran yang awalnya hampir sebulan dipersingkat menjadi seminggu.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada yang salah dengan rencana KPU itu. Menurutnya, jika pendaftaran capres-cawapres tidak dimajukan malah akan mempengaruhi tahapan pemilu. "Kalau tidak dimajukan justru mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Mahfud menjelaskan, jadwal tahapan pemilu ditentukan oleh KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) setelah dipertimbangkan bersama Mendagri, DPR, dan Bawaslu. Dalam perjalanannya, muncul kekhawatiran jika jadwal yang lama malah mengganggu pemungutan suara yang direncanakan berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Tapi ketentuan bahwa masa kampanye harus selesai tiga hari sebelum pencoblosan, sebelum pemungutan suara dan logistik harus selesai sekian hari sebelum pemungutan suara, gambar sudah dicetak sekian hari sebelum pemungutan suara itu ada di UU," jelasnya.

"Nah, di UU itu kalau menggunakan jadwal lama berdasar pasal 26 itu enggak terkejar. Kalau menggunakan jadwal lama harus menunda malahan. Oleh sebab itu harus menunda dalam arti tanggal 14 [Februari 2024]," lanjutnya.

Dengan pertimbangan itu, lanjut Mahfud, maka KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023. "Itu udah cukup pendaftaran, lalu di situ ada pemeriksaan kesehatan, penetapan daftar calon, dan sebagainya," tuturnya.

Mahfud juga menyebut, memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres justru untuk melaksanakan undang-undang karena telah ada di Perppu. "Perppu tentang Pemilu berkenaan dengan terjadinya pemekaran, ada IKN. Di Perppu itu disebutkan tahapan-tahapan itu. Setiap hari kampanye, setiap hari sebelum pemungutan suara harus selesai kampanye dan seterusnya, dan itu sesudah dihitung bisa kalau tanggal 10 sampai 16. Kan, cuma mendaftar," pungkasnya.

Komisi II DPR RI menyatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas memajukan

masa pendaftaran capres cawapres di Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan pihaknya segera mencari waktu untuk membahas peraturan KPU yang mengusulkan pendaftaran capres cawapres dimajukan

"Ingin secepatnya memanggil KPU supaya ada kepastian untuk partai politik, bacapres dan bacawapres," kata Saan Mustopa dalam program Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin, 11 September 2023.

Rencananya, Komisi II DPR akan menjadwalkan pemanggilan terhadap KPU pada pekan ini. Sebab secara umum, persoalan ini pernah disampaikan ketika KPU, pemerintah, dan DPR membahas soal Perppu Pemilu. "Ada juga usulan dari KPU soal masa penetapan capres cawapres dan penetapan daftar calon tetap untuk caleg," ungkap Saan. (wid,rls,ist/dya)

## KPU PERCEPAT DAN PERSINGKAT MASA PENDAFTARAN CAPRES-CAWAPRES 2024

### PENDAFTARAN PASANGAN CAPRES-CAWAPRES



**JADWAL AWAL:**  
19 OKT-25 NOV 2023  
(Diatur dalam PKPU 3/2022)



**JADWAL BARU:**  
10 OKT-16 OKT 2023  
(Draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)



**PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CAPRES-CAWAPRES**  
10 OKTOBER - 25 OKTOBER 2023



**PENETAPAN PASANGAN CAPRES-CAWAPRES**  
13 NOVEMBER 2023



**PENETAPAN NOMOR URUT CAPRES-CAWAPRES**  
14 NOVEMBER 2023





# DPRD JATIM APRESIASI LANGKAH GUBERNUR LAKUKAN PERUBAHAN PERDA 13 TAHUN 2018

**SURABAYA** – Upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah mendapat sambutan positif dari fraksi – fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim.

Selain sambutan positif bahkan juga mendapat apresiasi terpakai terhadap kinerja Gubernur Jatim tersampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (11/9/2023). Salah satu yang menjadi perhatian dari fraksi-fraksi ini adanya penambahan metode omnibus law dalam raperda tersebut.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Imam Makruf mengatakan bahwa penerapan omnibus law yang dimaksud dalam raperda ini adalah memuat norma untuk memungkinkan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan perda yang ditetapkan dalam propemperda. “Sementara, untuk peraturan gubernur telah diatur dalam pasal 74 dengan dikoordinasikan oleh biro hukum,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kedua platform hukum yang memuat substansi sesuai dengan pasal 64 Undang Undang nomor 13 tahun 2022, dengan demikian metode omnibus baik dalam pembentukan perda maupun perkada telah terakomodir dalam raperda perubahan dimaksud.

Dia juga menandakan bahwa setiap perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas dan valid. Undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai aturan induk dalam pembuatan produk hukum telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui undang undang nomor 13 tahun 2022.

“Sebagai bentuk tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya perubahan kedua terhadap undang undang nomor 12 tahun 2011 mengusung norma yang menjadi ratio decidendi putusan yang dimaksud yaitu memunculkan metode omnibus serta partisipasi masyarakat yang bermakna dengan tujuan terwujudnya pembentukan peraturan perundang undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Sri Hartatik mengatakan bahwa bapemperda telah



Suasana sidang paripurna DPRD Jatim

menyampaikan penjelasan bahwa perda Jatim nomor 13 tahun 2018 disahkan masih berdasarkan undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan turunannya. Prinsipnya masih memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam proses pembentukan hukum daerah.

“Fraksi Golkar sepakat dengan pendapat dari Gubernur bahwa perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 ini adalah urgent baik pada proses pembentukannya maupun muatannya, agar konsepsi perda benar benar memenuhi dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal hal yang masih perlu dipertimbangkan dalam peraturan kepala daerah.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Ratnadi Ismaon, mengungkapkan bahwa Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan pendapatnya terhadap rancangan Perda inisiatif tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2018.

Dia juga mengungkapkan terdapat materi pokok yang perlu disempurnakan dari ketentuan dalam peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2018, yaitu, penambahan materi mengenai

pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan menggunakan metode omnibus law.

“Penambahan materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan serta electronic, baik untuk rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur, maupun rancangan peraturan DPRD,” tambanya.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara Daniel Rohi mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan mengapresiasi pendapat Gubernur Jawa Timur bahwa terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi Bapemperda yang telah bekerja keras menggodok, mengkoordinasikan berbagai hal teknis, serta mematangkan konsep terkait perubahan terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah ini.

Kemudian, merujuk pada seluruh proses pembebasan yang telah dilakukan dalam berbagai forum serta didorong oleh semangat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan warga provinsi Jawa Timur maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui perubahan terhadap

peraturan Daerah nomor 13 tahun 2018, untuk dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengindahkan seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Menurutnya ada beberapa materi pokok yang harus disempurnakan dari ketentuan perda tersebut. Yang pertama adalah penambahan materi mengenai omnibus law. Yang kedua adalah penambahan materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, baik untuk rancangan peraturan gubernur, rancangan peraturan gubernur, maupun rancangan peraturan APBD.

Yang ketiga adalah menambahkan materi mengenai mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur kepada menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Penyempurnaan materi mengenai keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” katanya. (Lut/dya/ADV)